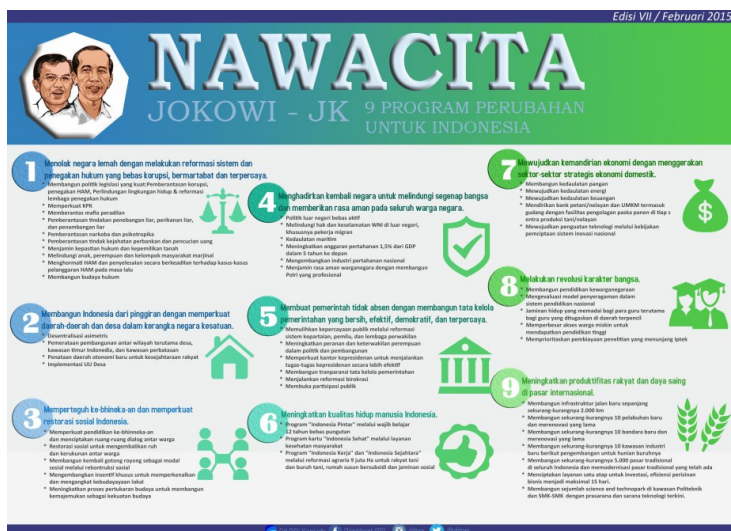


Kominfo dan BPPT Gelar Dialog Nasional Menuju e-Nawacita



Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar Dialog Nasional Inovasi TIK 2015. Dialog bertema "Meraih e-Nawacita dengan Pelayanan Publik Elektronik yang Inovatif dan Bermutu untuk Pemerintah dan Demokrasi" digelar agar pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah seharusnya bisa mengefisienkan pelayanan publik dari negara kepada masyarakat.

"Penerapan TIK ini sudah seharusnya bisa digunakan untuk efisiensi pelayanan publik dari Negara untuk masyarakat," sambut Menkominfo Rudiantara. "Aplikasi pelayanan publik oleh pemerintah pusat juga sangat terbatas, padahal pelayanan publik tersebut harus diberikan semenjak seseorang lahir hingga meninggal dunia. Pengimplementasian TIK di kantor-kantor pemerintah, saat ini masih mengarah hanya pada bagaimana caranya mengotomatisasi suatu proses bisnis," nilainya.

Diungkap Rudiantara, di kantor Imigrasi yang menurutnya kurang efisien, karena sampai saat ini masih mengharuskan seseorang yang akan memperpanjang paspor untuk datang terlebih dahulu. "Mungkin satu saat nanti, jika kita ingin memperpanjang paspor, kita gak perlu datang dulu. Cukup apply dan pilih reservasi untuk menentukan kapan bisa menandatangani dan proses finalisasi lainnya," harapnya.

Rudiantara mengakui, keadaan geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan membuat jaringan komunikasi masih mengalami kendala di beberapa daerah. "Kita tidak bisa pungkiri keadaan geografis Indonesia juga jadi kendala, karenanya pemerintah menargetkan tahun 2018 atau 2019 seluruh ibukota Kabupaten sudah terkoneksi broadband dengan sinyal 4G di bench 1.800 sehingga rangking jaringan kita bisa naik di ASEAN," tambahnya.

Sedangkan Kepala BPPT Unggul Priyanto, mengatakan bahwa di era informasi saat ini, pencapaian cita-cita pembangunan tersebut tidak dapat lepas dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mampu menghilangkan batas jarak dan waktu yang cocok dengan kondisi geografis kepulauan Indonesia dalam mewujudkan konektivitas secara logis.

Ditambahkannya, dalam mendukung implementasi teknologi, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti dalam pemilihan Kepala Desa melalui proses pemilihan elektronik di tujuh Kabupaten. "Sampai tahun 2015 ini telah dihasilkan 250 Kepala Desa melalui sistem elektronik. Karenanya melalui peluncuran buku pedoman implementasi 'e-Pilkades' serentak di Indonesia diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten lain dalam mengimplementasikan e-Pilkades serentak. Secara nasional, e-voting sudah menjadi alternatif dalam pemilihan kepala daerah serentak sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015, karena memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan dan efektif dalam penyelenggaraannya," jelasnya.

source: <http://majalahict.com/berita-8109-kominfo-dan-bppt-gelar-dialog-nasional-menuju-enawacita.html>